

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN LAPAK
UNTUK MENJAMIN KESEJAHTERAAN UMKM
DI KOTA MADIUN**

SKRIPSI



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

MAHARANI ANGGRAINI SETYOWATI, 2023, Peran Pemerintah Kota Madiun Untuk Manjamin Kesejahteraan Umkm. Skripsi Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Strategi Pemerintah, Dampak Pemerintah

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan pada undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat besar untuk mengurus urusan pemerintahnya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan usaha pemerintah daerah dalam hal meningkatkan kreatifitas serta inovasi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama peran pemerintah Kota Madiun untuk menjamin kesejahteraan UMKM, kedua strategi pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, ketiga dampak penyediaan lapak oleh pemerintah bagi UMKM. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan UMKM, lalu analisis strategi dalam menjamin kesejahteraan UMKM di Kota Madiun, lalu analisis dampak penyediaan Lapak UMKM di Kota Madiun bagi para pelaku UMKM.

Dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan/metode kualitatif (field research) karena melakukan pengamatan langsung sedangkan dalam pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Terbukti dengan adanya pengembangan usaha mikro dalam Program Lapak di setiap Kelurahan ini telah Terbukti dengan adanya pengembangan usaha mikro dalam Program Lapak di setiap Kelurahan ini telah berjalan dengan baik terbukti dengan meningkatnya penjualan dan prospek kedepannya serta berkembangnya cara pemasaran atau penjualan yang dilakukan oleh para pedagang meskipun tidak dapat dipungkiri tetap ada kendala-kendala yang harus menjadi perhatian dan fokus untuk perbaikan dan pengembangan lanjutan seperti masalah keamanan, fasilitas tempat makan dan tempat berjualan serta tempat parkir. Dilihat dari aspek teknis dan teknologis. 2. pemilihan lokasi Lapak bisa dikatakan sudah sesuai dan cukup strategis serta representatif untuk berjualan hanya saja dari segi teknologi bisa di katakan sangat kurang, selama ini para pedagang hanya menggunakan cara sederhana baik untuk alat kerja maupun pengemasan. Sebelumnya pernah diadakan pelatihan pengemasan namun hanya untuk perwakilan pedagang Lapak

sehingga hanya sedikit yang sudah terpapar kemampuan pengemasan modern.. Dari cara pengelolaan atau aspek manajemen masih berjalan secara sederhana, namun demikian pengembangan usaha mikro dalam program Lapak di Kelurahan utamanya dalam system pengelolaan penjualan akan dikembangkan ke arah yang modern secepatnya. 3. Dampak dari pembangunan Lapak ini adalah mampu memberikan lokasi bagi UMKM untuk berjualan agar lebih tertata rapi dan mampu mengurangi jumlah pengangguran di Kota Madiun dan pendapatan ekonomi di Kota Madiun pun meningkat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Maharani Anggraini Setyowati	40119027 5	Ekonomi Syariah	Pelaksanaan Program Pembangunan Lapak Untuk Menjamin Kesejahteraan Umkm Di Kota Madiun

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

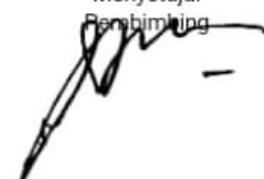
Ponorogo, 2 April 2023

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah




Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
 NIP. 197801122006041002

Menyetujui
 Pembimbing



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin,
 M.Ag.
 NIP. 197207142000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pelaksanaan Program Pembangunan Lapak Untuk
 Menjamin Kesejahteraan UMKM Di Kota UMKM
 Nama : Maharani Anggraini Setyowati
 NIM : 401190275
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang
 Ridho Rokamah, S.Ag., MSI
 NIP. 197412111999032002
 Penguji I
 Iza Hanifuddin, Ph.D
 NIP. 196906241998031002
 Penguji II
 Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin,
 M.Ag.
 NIP. 197207142000031005

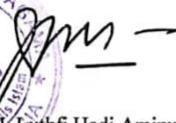
:
 ()
 :
 ()
 :
 ()

Ponorogo, 13 April 2023

Mengesahkan

Dekan FEBI IAIN Ponorogo




 Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
 NIP. 197207142000031005

Surat Persetujuan Publikasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani Anggraini Setyowati

Nim : 401190275

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Judul : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN LAPAK
UNTUK MENJAMIN KESEJAHTERAAN UMKM DI KOTA
MADIUN

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah di periksa dan disahkan oleh dosen pembimbing selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya

Ponorogo, 29 Mei 2022

Penulis



Maharani Anggraini Setyowati

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Maharani Anggraini Setyowati

NIM : 401190275

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN LAPAK
UNTUK MENJAMIN KESEJAHTERAAN UMKM
DI KOTA MADIUN”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya seni saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 2 Maret 2023

Pembuat Pernyataan,



Maharani Anggraini Setyowati

NIM. 401190275

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Masalah.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Lokasi/ Tempat Penelitan.....	20
4. Data dan Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Pengolahan Data.....	24
7. Analisis Data.....	25
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	26
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KAJIAN TEORI.....	29
A. Peran Pemerintah Menurut Ekonomi Islam	29
B. Acuan Pemerintah Dalam Membangun Lapak UMKM.....	39
C. Strategi Pemerintah Dalam Membangun Lapak UMKM.....	36
D. Indikator Kesejahteraan UMKM.....	43
BAB III PAPARAN DATA.....	41
A. Sejarah Lokasi Penelitian.....	41
B. Pelaksanaan program pembangunan Lapak UMKM.....	43
C. Strategi Pemerintah Kota Madiun Dalam Pembangunan Lapak UMKM.....	49
D. Dampak Program Pembangunan Lapak Terhadap Jaminan Kesejahteraan UMKM Di Kota Madiun.....	59
BAB IV ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN UMKM	62
A. Pelaksanaan program pembangunan Lapak UMKM	62
B. Strategi Pemerintah Kota Madiun Dalam Pembangunan Lapak UMKM.....	65

C. Dampak Program Pembangunan Lapak Terhadap Jaminan Kesejahteraan UMKM Di Kota Madiun.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
1. Kesimpulan.....	70
2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74
Gambar 1. Kelurahan Taman.....	74
Gambar 2. Kelurahan Kejuron.....	74
Gambar 3. Kelurahan Nambangan Kidul.....	75
Gambar 4. Kelurahan Nambangan Lor.....	75
RIWAYAT DATA DIRI.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan manusia yang sepenuhnya bergantung kepada Allah yang dilandasi dengan pemenuhan ibadah kepada Allah untuk memperkuat pemahaman. Kemudian melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan memenuhi kebutuhan material.¹ Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan yang ada.

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi *“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh sungguhnya professional”*. menganjurkan Dari hadis tersebut Allah menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah.

¹ Kokom Komariah, “Peran Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3703–11, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.

Sebagai makhluk, kita diwajibkan untuk selalu berusaha dan berdoa dalam segala hal termasuk dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan agar bisa mencapai kehidupan yang sejahtera. Seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 9 yang artinya *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka mengucapkan perkataan yang benar”*. Berpijak pada ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut mengajarkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja sebagai wujud ikhtiar dan bertawakal kepada Allah.²

Islam berkomitmen dan menekankan persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan islam, akan tetapi konsep islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentolerasi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat.³

Kesejahteraan merupakan cita-cita sosial yang tidak hanya diangankan

² Aini Khimawati, Ashlihah, and Mustamim “Peran UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 60–66.

³ Jureid, "Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era Covid-19," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2020): 225-236.

untuk dimiliki tetapi juga harus diusahakan.

Tanpa usaha dan kerjasama diantara berbagai macam pihak, kesejahteraan merupakan fatamorgana. Sebagai pakar menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang digambarkan oleh Al-Quran tercermin di surga yang dihuni oleh adam dan istrinya, sesaat sebelum turunnya mereka menjalankan tugas kekhalifahannya mereka di bumi ini. Kesejahteraan di surga merupakan suatu yang diberikan akan tetapi sesuatu yang harus diusahakan, dicari dan diperjuangkan untuk dimiliki dan dinikmati.⁴

Maka dari itu salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kota Madiun yaitu menjalankan UMKM. UMKM akan tambah maju dengan kebijakan-kebijakan dan intervensi pemerintah yang tepat serta memberikan fasilitas untuk pemulihan usaha secara maksimal. Namun kita semua tidak boleh lengah terhadap apa yang ada. Berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi mau tidak mau berimbas pada sektor UMKM. Mobilitas masyarakat dibatasi, pelaku dan konsumen UMKM dipaksa untuk mengurangi mobilitas di luar rumah. Hal ini mengakibatkan sektor UMKM seperti mati suri tidak dapat menjalankan system ekonominya dengan baik.

Perkembangan UMKM semenjak masa pandemi mengalami penurunan drastis. Mulai dari penurunan secara tajam omzet penjualan, kesulitan dalam mendapatkan modal, kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan hingga beberapa di

⁴ Maryanto Maryanto, Munsharif Abdul Chalim, and Lathifah Hanim, "Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1484>.

antaranya terpaksa harus melakukan PKH. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, distribusi dan produksi terhambat.

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan pada undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat besar untuk mengurus urusan pemerintahnya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan usaha pemerintah daerah dalam hal meningkatkan kreatifitas serta inovasi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.⁵

Kebijakan pemerintah dalam merespon problematika ekonomi melalui pemberdayaan para pelaku UMKM merupakan sebuah langkah dan peran tanggung jawab yang diberikan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk kebutuhan ekonomi. Sehingga kebijakan dan langkah yang diberikan pemerintah di atas merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa dalam hal prekonoman.

Pemerintah Kota Madiun mempersiapkan kelurahan-kelurahan di

⁵ Monica Dwipi Salam and Ananta Prathama, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 137–43, <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.

wilayah administrasinya untuk mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Madiun memberi trobosan sebuah inovasi “Lapak UMKM”. Lapak UMKM adalah suatu program berbasis ekonomi lokal yang tersebar di 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Dengan adanya Lapak UMKM akan membantu pelaku UMKM yang tidak memiliki tempat untuk pemasaran produk-produknya. Pembangunan Lapak UMKM bertujuan untuk pemulihan ekonomi akibat covid-19. Selain itu pembangunan Lapak UMKM merupakan suatu wujud pemerataan pembangunan di Kota Madiun.

Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2020 mengangarkan dana sebesar 15 miliar rupiah yang dibagikan kepada 3 kecamatan dengan masing-masing kecamatan sebesar 5 miliar rupiah. Dana Intensif Daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Lapak UMKM bukan hanya memberikan dampak positif bagi UMKM saja, namun memiliki manfaat lain yaitu sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam Inovasi Lapak UMKM, kelurahan secara mandiri diberikan kebebasan untuk mengelola, membuat konsep, menentukan produk yang dijual, dan kegiatan operasional lainnya.

Pada mulanya pembangunan Lapak UMKM menggunakan Dana Insentif daerah (DID) kemudian dilanjutkan oleh dana APBD yang dialokasikan untuk penyempurnaan dan pengembangan Lapak. Terdapat beberapa Lapak UMKM yang menjadi salah satu percontohan bagi Lapak

UMKM lainnya, diantaranya adalah Lapak UMKM Donopuran, UMKM Bumi Semendung, dan Lapak UMKM Joglo Palereman.⁶

Pemerintah Kota merupakan instansi/ perangkat daerah yang memiliki fungsi yaitu memberi fasilitas kepada Lapak UMKM di setiap kelurahan. Salah satu OPD yang bertanggung jawab adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas tersebut memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap penjual yang bergabung dalam Lapak UMKM. Selain itu, pemerintah Kota melalui perangkat kelurahan juga mengkoordinir, membuat kebijakan, mengevaluasi dan melakukan monitoring terhadap inovasi Lapak UMKM. Penjual di Lapak UMKM mayoritas adalah pedagang kecil dan masyarakat yang baru memulai usaha. Penjual-penjual yang baru memulai usaha tersebut adalah mereka yang terkena PHK akibat pandemic sehingga dengan adanya Inovasi Lapak UMKM mereka dapat menyambung hidup.

Di dalam Lapak UMKM penjual juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan usaha baik dari pemerintah maupun dari pengelola Lapak. Pengakuan akan keberadaan UMKM terdapat peran pendamping usaha untuk UMKM. Lapak UMKM mendapat dukungan penuh dari Pemkot Madiun. Hal tersebut terbukti dari seringnya kunjungan dari WaliKota dan perangkat yang lain ke Lapak UMKM. Dalam rangkaian acaranya, WaliKota dan perangkat bukan hanya mengevaluasi kondisi Lapak, namun

⁶ Dimas Arys Prasetyo and Nasikh, "Penguatan UMKM Melalui Inovasi 'Lapak UMKM' Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi," *E-Qien* 10, no. 2 (2022): 201–6, <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/614%0Ahttps://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/download/614/406>.

juga ikut mempromosikan Lapak- Lapak UMKM di setiap kelurahannya. Pada setiap kunjungannya, WaliKota mengadakan berbagai acara seperti gowes sehat, senam pagi. Dukungan penuh terhadap UMKM juga ditunjukkan Pemkot Madiun.

Berdasarkan hasil wawancara pelaku UMKM mengatakan “selain jual beli di hari-hari biasa, pada saat tertentu jika ada acara seperti perkumpulan RT, atau arisan, ulang tahun, senam ibu-ibu, senam lansia juga di lakukan di Lapak ini. Biasanya mereka yang punya hajat sudah pesan menu dari kami beberapa hari sebelum hari h atau sehari sebelum juga bisa dan itu akan menambah omset jualan kami menjadi meningkat. Karena acara itupun juga Lapak menjadi ramai dan terkadang sebagai memancing orang juga untuk datang ke Lapak dikarenakan melihat temannya yang ada disini jadi sekalian nimbrung ngopi-ngopi gitu.

Yang paling ramai adalah saat pertemuan Wali Kota dengan masyarakatnya juga dilakukan di Lapak ini. Mengapa ramai? Karena pada saat tengah-tengah pembicaraan WaliKota yaitu Bapak Maldi akan memberika uang kepada anak-anak dengan cara permainan atau memberi pertanyaan jika bisa menjawab bapak WaliKota akan memberikan uang sebagai hadiahnya. Dan setelah itu juga para masyarakat yang ikut sosialisasi WaliKota juga akan mampir melihat dan membeli jualan kami”.

Keunggulan lain dari UMKM adalah tingkat flekdibilitas yang tinggi, relatif terhadap pesaingnya dan dapat menghadapi perubahan kondisi pasar yang cepat. Fakta menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang

diciptakan oleh kelompok UMKM tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.

UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu mereka juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang potensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial⁷ dan salah satu peranan penting dalam membantu pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi. Dari sudut pandang kemajuan prekonomian negara tidak lepas dari campur tangan UMKM dalam kontribusinya yang besar. Sektor UMKM sangat mendominasi dari segi jumlah dan serapan tenaga kerja tetapi secara keseluruhan pengusaha besar tetap lebih mendominasi dari segi jumlah dan serapan tenaga kerja tetapi secara keseluruhan Pengusaha besar tetap lebih mendominasi baik dari segi modal, asset dan perkembangan usaha.⁸

Pada kondisi terburuk, pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak akibat pandemi juga dirasakan pada prekonomian sektor Usaha

⁷ Arsad Bahri, Usman Mulbar, and Andi Suliana, "Study On Makassar City Empowerment Of Msmes As An Efforts To Increase The Welfare Of Business Actors," *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar* 1, no. 1 (2019): 37–53, <https://bppd-makassar.e-journal.id/inovasi-dan-pelayanan-publik/article/view/47>.

⁸ Muhammad Iqbal, "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 77, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>.

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah besar jika dilihat dari perspektif perkembangannya. UMKM terbukti tahan terhadap berbagai macam masalah pada krisis ekonomi. Sehingga kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok sebagai penguat.⁹ Problematika prekonomian khususnya ekonomi masyarakat berupa UMKM tentu memerlukan sebuah langkah dan peran dari pemerintah. Sementara dalam kondisi lain ekonomi islam hadis sebagai manifestasi mewujudkan nilai-nilai agama dalam hal ekonomi (termasuk peran pemerintah dalam hal ekonomi).

Dari problematika dan model pendekatan di atas, kajian ini memiliki tujuan untuk melihat peran pemerintah dalam menyelamatkan sector UMKM dengan rumusan masalah peneliti sebagai berikut: 1) Bagaimana peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan Kota Madiun dalam menjamin keberlangsungan UMKM. 2) Bagaimana strategi pemerintah Kota Madiun dalam menjamin kesejahteraan UMKM. 3) Bagaimana dampak dari upaya penyediaan Lapak Pemerintah Kota Madiun terhadap kesejahteraan UMKM

Sejauh ini penelitian tentang “program pembangunan lapak untuk menjamin kesejahteraan umkm di Kota Madiun ” masih banyak dilakukan contohnya seperti penelitian terdahulu Monica Dwipi Salam dan Ananta Pratama dengan judul “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan*

⁹ Suhery, Trimardi Putra, and Jasmalinda, “Jurnal Inovasi Penelitian,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 3 (2020): 1–4.

UMKM”. Lalu penelitian Yessi Monica Chandra dengan judul “*Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Lapak UMKM Di Kota Madiun*” kemudian penelitian yang di lakukan oleh Sherlin Indah Kusumaningtyas dan Dhani Ichsanuddin Nur dengan judul “*Analisis Pendapatan Lapak UMKM*” tetapi ada beberapa tulisan yang sedikit membedakan dalam penelitian ini salah satunya penelitian ini menggunakan Kota Madiun sebagai tempat penelitian dalam penataan pemerintah Kota Madiun dalam UMKM agar terkontrol sebagai peneliti utama.

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana keadaan UMKM saat ini sedang mengalami resesi, lalu bagaimana cara pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan omset usahanya dan beberapa persen tingkat pendapatan UMKM Kota Madiun dengan disediakannya Lapak oleh pemerintah Kota Madiun yang ada di setiap kelurahan di Pemerintah Kota Madiun pada masa pandemi dan setelahnya. Aktivitas perekonomian dalam wilayah perKotaan menjadi magnet bagi masyarakat luas dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia sehari hari.

Kebutuhan akan sandang dan pangan harus dipenuhi setiap harinya. Perekonomian suatu bangsa dan negara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara juga dapat dilihat dari level pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Umumnya pertumbuhan ekonomi dalam perKotaan disebabkan adanya kelemahan dari sistem ekonomi relatif

menganggap bahwa struktur ekonomi wilayah dan perKotaan adalah sama dengan struktur ekonomi nasional.

Berdasarkan urgensi permasalahan dan analisis yang telah diuraikan, maka peneliti ingin menganalisis lebih mendalam mengenai kebangkitan ekonomi khususnya terhadap pedagang kaki lima yang ada diLapak menjadikan Kota Madiun sebagai Kota bebas penganguran, kekinian di dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan melakukan pengalihan potensi-potensi lokal, dimana kebangkitan ekonomi dinilai dalam mengatasi problem perekonomian yang paling mendasar, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pelaksanaan Program Pembangunan Lapak Untuk Menjamin Kesejahteraan UMKM Di Kota Madiun”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pembangunan Lapak UMKM?
2. Bagaimana stategi Pemerintah Kota Madiun dalam pembangunan lapak UMKM?
3. Bagaimana dampak program pembangunan lapak terhadap jaminan kesejahteraan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

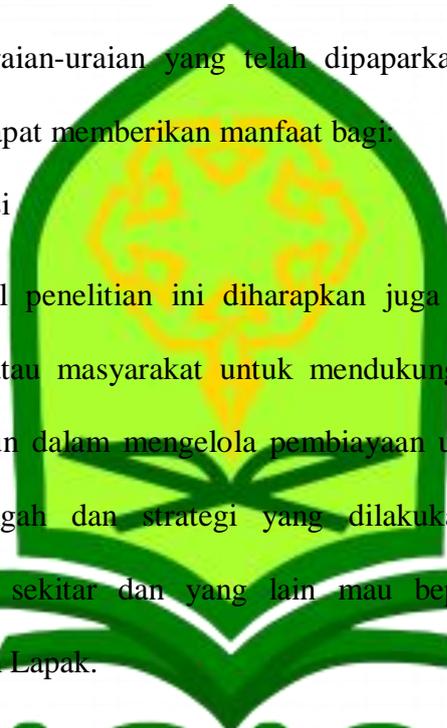
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui pelaksanaan program pembangunan Lapak UMKM?
2. Ingin mengetahui strategi Pemerintah Kota Madiun dalam pembangunan lapak UMKM?
3. Ingin mengetahui dampak program pembangunan lapak terhadap jaminan kesejahteraan UMKM?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Praktisi



Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat untuk mendukung Lapak UMKM Kota Madiun dalam mengelola pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dan strategi yang dilakukan Pemkot agar masyarakat sekitar dan yang lain mau berpartisipasi dalam meramaikan Lapak.

b. Bagi Penulis



Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai peranan Lapak Kota Madiun dalam mengelola perekonomian usaha mikro kecil dan menengah dan strategi yang dilakukan Pemkot agar masyarakat sekitar maupun yang lain bergabung untuk meramaikan Lapak.

c. Bagi Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang peranan adanya Lapak di Kota Madiun dalam mengelola perekonomian usaha kecil dan menengah dan strategi yang dilakukan Pemkot agar masyarakat sekitar mau ikut meramaikan Lapak Kota Madiun.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang peran pemerintah dalam ekonomi syariah dan UMKM:

Pertama, Skripsi Hamami Cahya Prastika Yang Berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan” 2017. Masalah pada skripsi ini memfokuskan pada Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan? Serta Bagaimana partisipasi para pengrajin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi sebagai upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan?. Hasil dari skripsinya adalah Peran Pemerintah Daerah Secara umum, peran pemerintah dalam upaya pengembangan kerajinan kulit yang

mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data hasil wawancara sebagai berikut :

a. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Pada pengembangan UMKM yang berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 dalam produk dan pengolahan pemerintah telah memberikan fasilitas berupa mesin jahit. Pada pemasaran, pemerintah memberikan fasilitas dengan menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM satu bulan sekali. Mengenai Sumber Daya Manusia, pemerintah memberikan fasilitas berupa pelatihan keterampilan dan untuk desainnya, pemerintah juga memberikan pelatihan keterampilan cara mendesain sepatu mulai dari teori dan pola sepatu.

b. Peran Pemerintah sebagai Regulator Pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 melalui tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, produk dan pengolahan serta Sumber Daya Manusia dijalankan sesuai apa yang tertulis di Peraturan Bupati Magetan.

c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, upaya pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai katalisator yang pertama pada produksi dan pengolahan, pemerintah mencoba untuk membantu pengrajin untuk menambah modal melalui kerjasama dengan BUMN seperti INKA.

Kedua. Pemerintah bekerjasama dengan pihak TELKOM dengan mendirikan wadah bagi pengrajin untuk belajar mengakses internet atau yang disebut dengan kampung digital. Ketiga, Sumber Daya Manusia yaitu pemerintah mencoba merekrut pengrajin muda dengan

memberikan pelatihan agar lebih inovatif dan produktif sedangkan yang keempat, desain dan teknologi peran pemerintah sebagai katalisator memberikan pelatihan melalui kerjasama dengan BIPI (Balai Persepatuan Indonesia). Jadi, tipologi peran pemerintah daerah di Kabupaten Magetan dalam upaya pengembangan kerajinan kulit terdapat pada peran pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit untuk memudahkan pengrajin dalam proses pembuatan sepatu, menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM agar pengrajin dapat memasarkan produk kerajinan kulit melalui website atau penjualan online serta memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan keterampilan.

Kedua skripsi dari Riska Oktavian¹ dan Luthfi Hadi Aminuddin yang berjudul “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Toko Sepeda Eks Bike Dolopo”. Yang memfokuskan pada (1) strategi pemasaran segmentasi dalam rangka meningkatkan penjualan pada Toko Eks Bike. (2) Strategi pemasaran targeting dalam rangka meningkatkan penjualan pada Toko Eks Bike. (3) Strategi pemasaran positioning dalam rangka meningkatkan penjualan pada Toko Eks Bike. (4) Dampak setelah dilakukan segmentasi, targeting, dan positioning pada Toko Eks Bike. Dan menghasilkan data bahwa Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terkait strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan pada Toko Eks Bike Dolopo, peneliti menyimpulkan bahwa: (1) Penerapan strategi pemasaran segmentasi memiliki peran untuk meningkatkan penjualan pada Toko Eks Bike. Toko Eks Bike namun penerapan strategi ini masih belum maksimal sehingga belum mampu

meningkatkan penjualan. (2) Penerapan strategi pemasaran targeting memiliki peran untuk meningkatkan penjualan pada Toko Eks Bike. Toko Eks Bike namun penerapan strategi ini masih belum maksimal sehingga belum mampu meningkatkan penjualan. (3) Penerapan strategi pemasaran positioning memiliki peran untuk meningkatkan penjualan pada Toko Eks Bike. Toko Eks Bike pada penerapan strategi ini dinilai dapat meningkatkan penjualan. (4) Dampak dari penerapan strategi pemasaran segmentation, targeting, dan positioning yang dilakukan oleh Toko Eks Bike masih belum maksimal. Terutama untuk segmentation yang fokus penjualannya hanya di wilayah Kecamatan Dolopo dan sekitarnya pada akhirnya segmentasi pasar kurang luas. Kemudian targeting yang secara spesifik target pasar belum terbentuk, sehingga dampak dari penerapan strategi ini belum mampu meningkatkan penjualan.¹⁰

Ketiga, Skripsi dari Nur Fitrah Ramadhany, yang berjudul “Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar”. Yang memfokuskan pada bagaimana kebijakan pemerintah terhadap tempat pembuangan akhir. Skripsi ini menghasilkan 1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Berdasarkan hasil analisis data yang dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak kebijakan pemerintah terhadap tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, melihat kondisi dilapangan keputusan pemerintah menempatkan TPA di Tamangapa karena memenuhi syarat untuk dijadikan tempat pembuangan

¹⁰ R. Oktavian and L.H. Aminuddin, “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Nasabah,” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 2 (2022): 333–346.

akhir sampah karena Tamangapa lahan tanahnya yang paling luas, namun tidak sesuai dengan peraturan daerah No. 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah karena belum mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih karena masih banyak sampah yang berhamburan di sekitar jalanan, namun penanganan sampah yang dilakukan di TPA belum terlaksana secara komprehensif dan terpadu karena sampah di TPA Tamangapa masih melakukan metode open dumping, yang dimana sampah ditumpukkan begitu saja. Adanya kerjasama antara investor asing, sesuai dengan peraturan daerah no 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah yang didalamnya disebutkan bahwa dalam proses mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih disekitar tempat pembuangan akhir sampah perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proposional, ditempat pembuangan akhir sampah tersebut menjadi lahan ekonomi bagi komunitas pemulung, di TPA Tamangapa peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya penanganan sampah belum efektif dan efisien.

2. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan segala aktivitasnya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, kedua dampak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

- Dampak positif bagi masyarakat setempat terhadap keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, masyarakat menengah kebawah mempunyai pandangan bahwa TPA akan mendatangkan kesejahteraan kehidupannya.
- Dampak negatif bagi

masyarakat setempat, yaitu adanya rasa kekhawatiran timbulnya kerusakan lingkungan dan sumber penyakit bagi masyarakat setempat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Field research adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh para UMKM pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode field research digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. Field research dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survei dan eksperimen.

Survei meliputi pembatasan yang drastis, ibarat melihat melalui teropong, tempat yang terlihat sangat terbatas. Dengan demikian, apa yang hendak dipelajari harus sudah diketahui sebelumnya, gagasan atau prakonsepsi yang tidak boleh ada di field research, dalam survei sangat berperan. Eksperimen, merupakan pembatasan lebih lanjut lagi dari survei, dengan jumlah variabel sangat sedikit serta dapat dikendalikan.

Ada 4 komponen kunci berkaitan dengan field research sebagai bagian dari penelitian kualitatif:

- Penekanan pada setting natural

Setting natural berarti subjek penelitian tidak berpindah dari tempat asli kejadian. Peneliti menerapkan berbagai taktik untuk

menempatkan diri dalam konteks penelitiannya. Konteks tidak perlu berubah demi pelaksanaan penelitian.

- Fokus pada interpretasi dan makna Peneliti tidak hanya mendasari penelitiannya pada realitas empiris dari observasi dan wawancara yang dilakukannya, namun juga memainkan peran penting dalam menginterpretasi dan memaknai data.
- Fokus pada cara responden memaknai keadaan dirinya Tujuan dari peneliti adalah mempresentasikan gambaran menyeluruh dari setting atau fenomena studi, sesuai dengan pemahaman dari responden sendiri
- Penggunaan beragam taktik Sebagai bagian dari pengamatan realitas yang cenderung cair, field research tidak memiliki kecenderungan untuk hanya mengandalkan taktik tunggal, melainkan beragam sebagai paduan dari berbagai taktik sesuai keadaan lapangan.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, mengeksplorasi dan memahami suatu gejala utama merupakan tujuan dari teknik pendekatan penelitian ini. Untuk mengetahui gejala utama tersebut seorang peneliti harus melakukan wawancara responden atau partisipan dengan memberikan pertanyaan yang umum dan agak luas.

¹¹ Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2006): 59–66, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/view/16458>.

Jika partisipan telah memberikan informasi kemudian peneliti mengumpulkan data tersebut, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks.

Data yang berbentuk kata-kata atau teks tersebut kemudian dilakukan dianalisis. Hasil analisis bisa berupa gambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti melakukan interpretasi untuk menangkap arti yang terdapat dari sebuah masalah. Mengapa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif di penelitiannya karena peneliti ingin mengetahui apakah pemerintah Kota Madiun berhasil dengan tujuannya membangun Lapak UMKM untuk mensejahterakan Lapak

3. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa kelurahan yang ada di Kota Madiun, salah satunya di Kelurahan Nambangan Lor, Kec. Manguharjo Kota Madiun, Jawa Timur. Penelitian ini mengkaji peranan pemerintah dalam adanya Lapak di Kota Madiun untuk menjamin kesejahteraan UMKM.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah. pada penelitian ini menekankan pada peranan dan juga strategi yang dilakukan Pemkot agar masyarakat sekitar ikut serta dalam memeriahkan Lapak Kota Madiun. Yang menarik pada lokasi yang diteliti tersebut adalah adanya UMKM yang menempati Lapak UMKM di Kota Madiun ini sekitar ratusan UMKM yang sudah bergabung di

Lapak tersebut dan peneliti ingin mengetahui apakah tujuan dari pembangunan Lapak tersebut oleh pemerintah berhasil mendorong prekonomian para UMKM di Kota Madiun ini.

4. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan, yaitu data primer:

Data primer adalah “data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.” Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber pertamanya. Data primer yang penulis maksudkan adalah data yang penulis peroleh langsung dari lapangan yaitu informasi dari kepala koperasi dan anggotanya. Termasuk data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan observasi penulis terhadap pihak terkait. Data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Apa peran pemerintah yang menyebabkan kesejahteraan UMKM ini.
- b) Usaha atau strategi pemerintah dalam memajukan prekonomian UMKM.
- c) Dampak adanya Lapak UMKM apakah dengan adanya Lapak UMKM prekonomian masyarakat Kota Madiun meningkat atau tidak.

Data tersebut di ambil dari sumber data, sumber data pada

penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data di sebut responden, yaitu orang yang merspon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan.

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa benda atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi ini dilakukan¹⁹ sebagai studi pendahuluan mengenai peranan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian UMKM. Peneliti akan mendatangi untuk mengamati secara langsung kondisi sebenarnya yaitu Lapak UMKM apakah dengan adanya Lapak tersebut perekonomian masyarakat meningkat dan strategi pemerintah pun berhasil. Selanjutnya peneliti akan mencatat semua informasi penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Dokumentasi

Dokumentasi sebagai cara mencari dan mengurai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat

kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan- catatan, pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat lainnya, catatan-catatan dan arsip- arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang di kumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-catatan. Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran umum Lapak Kota Madiun

3) Wawancara langsung

Menurut Harsono, wawancara merupakan proses pengumpulandata yang langsung memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut Mantja,¹² Wawancara mendalam merupakan percakapan terarah yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi etnografi. Wawancara mendalam dapat diberi makna kombinasi antara pertanyaan-pertanyaan deskriptif, struktural dan kontras. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada seorang nara sumber atau dalam bentuk fokus group discussion, tergantung pada perjanjian dengan nara sumber.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti

¹²Harsono, 2008. *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dengan cara melakukan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab (Sujarweni, 2015). Menurut Sutrisno Hadi (1986), observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis¹³. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan langsung. Pada penelitian ini respondennya sendiri yaitu para UMKM yang berada di Lapak. Jenis wawancara yang digunakan secara terstruktur, dimana peneliti akan menyiapkan dahulu beberapa pertanyaan yang akan diajukan.

6. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data yang telah diperoleh dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Reduksi data

Reduksi data atau merangkum adalah tahap memilih hal-hal yang pokok dan hanya fokus pada point-point yang sekiranya diperlukan dan membuang data yang tidak digunakan. Reduksi data bisa dilakukan dengan abstraksi yaitu membuat rangkuman data penting terkait proses dan pernyataan yang perlu dijaga, sehingga reduksi data merupakan penggolongan atau proses pemilihan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan setiap data agar diketahui klasifikasi dari pada risiko pada usaha tersebut, faktor

¹³ Silvina Choiratul Fahmi, "Economic Empowerment of the Muslim Community (Study on The Assembly of Ta'lim Almuthmainah in Ponorogo District)," *Muslim Heritage* 5 (2020): 345–369.

apa saja yang sekiranya dapat menimbulkan risiko pada usaha tersebut, serta cara untuk memperkecil dampak risiko pada usaha tersebut. Kemudian data yang didapatkan tersebut selanjutnya akan disatukan dan dilakukan analisis.

1) Penyajian data (Display data)

Display data atau penyajian data, dalam tahap ini data yang telah terkumpul akan diolah untuk selanjutnya disusun secara rapi agar data tersebut dapat dengan mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti melakukan rangkuman seluruh data-data pokok dan selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk deskriptif sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan analisis penerapan Lapak Kota Madiun yang sesuai dengan rumusan masalah.

2) Kesimpulan (verifikasi)

Tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti melalui sumber dan dari segala macam teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Teori tersebut bisa berupa deskripsi dan gambaran suatu objek yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara responden. Pada tahapan ini peneliti ingin mengetahui apakah pemerintah berhasil mengembangkan Lapak ini untuk para UMKM.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Model deduktif atau deduksi, dimana masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat masalah penelitian. Peneliti menguji hipotesis penelitian dengan data yang ada pada Lapak UMKM di lakukan dengan mengonfirmasi dari teori awal yang menjadi pijakan sang peneliti.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah suatu proses yang penting dalam sebuah penelitian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Selain itu, proses pengecekan ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam setiap penelitian. Manfaat tersebut antara lain adalah dapat mengetahui ketidak sempurnaan (kelemahan dan kekurangan) dari

hasil penelitian, dengan demikian maka dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan kendala (realibilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas) dapat diadakan pengecekan dengan tehnik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses uji keabsahan data yang memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data telah dikonfirmasi pada sumber, metode, teori, dan antar peneliti lain serta waktu yang berbeda. Dengan cara seperti itu, peneliti akan lebih yakin bahwa data yang diperolehnya telah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari proposal penelitian ini dibuat menjadi empat bagian bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini ditujukan untuk menguraikan argumen tentang pentingnya mengkaji fokus

permasalahan yang dituangkan dalam perumusan masalah.

BAB II KAJIAN TEORI

Berisi tentang kajian teori yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu peran pemerintah dalam ekonomi islam, strategi pemerintah dalam mensejahterakan UMKM, serta apa dampaknya setelah pembangunan Lapak oleh pemerintah bab ini ditujukan untuk menguraikan dasar-dasar teori yang digunakan oleh peneliti untuk memperkuat rencana penelitian dan gambaran penelitian

BAB III PAPARAN DATA

Berisi tentang data-data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Pada bab ini berisi hasil wawancara dengan responden, dan sejarah lokasi penelitian di bagun karena apa.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Menjelaskan tentang analisis peran pemerintah dalam mensejahterakan UMKM dan strategi pemerintah dalam mensejahterakan UMKM

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Kesimpulan ditulis secara berurutan sesuai dengan urutan rumusan masalah. Selain itu, dalam penutup juga harus ditulis keterbatasan penelitian dan rekomendasi atau saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan penelitian lebih lanjut

BAB II

TEORI PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI

A. Konsep Teori Peran Pemerintah

1. Pengertian Peran

Dalam sistem ekonomi apapun baik itu sistem ekonomi kapitalis atau ekonomi sosial pemerintah selalu memiliki peran penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem kapitalis murni karna sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki tiga fungsi:

- a) Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalm negri dan pertahanan
- b) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan
- c) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta sseperti jalan, bendungan dll.

Adam Smith sebagi perancang sistem kapitalis semata mengungkapkan ideologinya karena dia berasumsi bahwa ekonomi kapitalis dari setiap individu lebih tahu apa yang dianggap baik untuknya. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktik membahas kepentingan yang saling bertentangan, karena tidak ada koordinasi yang menciptakan harmoni dalam kepentingan masing-masing individu. dalam ekonomi modern peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama yaitu:

- a) Peranan alokasi

b) Peranan distribusi

c) Peranan stabilisasi

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara tidak dibahas dalam teori atau perkiraan pemikiran ekonomi. Pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah yang terkait dengan sektor publik. Seperti menarik investor, mempromosikan pengembangan teknologi atau memproduksi/ melatih tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja.¹⁴

Dalam pondasi ekonomi islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan eksistensinya di muka bumi sebagai agen pembangunan. Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas yaitu upaya mewujudkan ekonomi islam.

Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan ekonomi tetapi tidak mampu dilakukan oleh individu. Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan tata kehidupan

¹⁴ Nurul Fadila, "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2010): 1–18.

yang baik bagi seluruh masyarakat. Sebagai pemegang amanah, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam Al-qur'an dan Sunnah baik secara eksplisit maupun implisit. Telah Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan peran yang dilakukan pemerintah. Peran-peran tersebut adalah:

- 1) Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimalkan kepentingan publik
- 2) Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religious dan politik.
- 3) Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah.
- 4) Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan drajat kekayaan dan kesejahteraan.
- 5) Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan/ pendapatan
- 6) Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip islam

Adapun bentuk campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi tercermin pada pasal 33 ayat 2 UUD yang berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Lalu dilanjutkan pada ayat 3 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹⁵

Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan fardh al-kifayah karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan fardh al-kifayah ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Asimetri dan kekurangan informasi
- 2) Pelanggaran moral
- 3) Kekurangan sumber daya atau kesulitan tekhnis

Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal menyelesaikan permasalahan ekonomi karena dua hal yaitu pertama ketidak sempunaan mekanisme pasar dan tidan berjalannya meanisme pasar dengan efisien.¹⁶

Di antara tugas-tugas penting pemerintah dalam prekonomian adalah sebagai berikut:

- a) Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian

Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen (*ahl al hisabah*).

¹⁵ Jennifer Brier and lia dwi jayanti, “Peran Negara Dalam Prekonomian (Tinjauan Teorotis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam” 21, no. 1 (2020): 1–9, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

¹⁶ Indra Hidayatullah, “Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam,” *Dinar* 1, no. 2 (2015): 79–88.

b) Menghentikan muamalah yang diharamkan

Yang dimaksud muamalah haram adalah bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas islam, yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba dan penimbunan dan monopoli. Islam sangat memperhatikan perekonomian umat, oleh sebab itu islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang agar tidak digunakan dengan sia-sia dan royal.

c) Mematok harga kalau dibutuhkan

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Adanya sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nash yang melarang pematokan harga. Diantaranya ialah riwayat Anas dari Rasul SAW. Anas berkata: *“di masa Rasul, harga-harga pernah melambung tinggi. Para sahabat lalu mengusulkan pada nabi: “wahai Rasulullah, hendaknya engkau mematok harga”. Nabi lalu menjawab, “Allahlah Dzat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan saya berharap di hari saya bertemu Allah, tak sesorangpun menuntuku atas kedzalimanku, baik dalam jiwa atau harta”*.¹⁷

2. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan

¹⁷ M. Arif Hakim. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Persepektif Islam," *Jurnal iqtishadia* 8 no. 1 (2015).

pemerintah adalah proses pemenuhan dan pelidungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Menurut Suryaningrat (1978:2) Pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan. Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan(Nugroho, 2003. 36).

Menurut Ndraha (2005 : 57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif, sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan dan ketiga fungsi pelayanan. Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

Osborne dan Gaebler (terjemahan Rosyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk

menyenangkan warganya. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje (dalam Hamdi, 2009 : 52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

3. Langkah-Langkah Dalam Menjalankan Peran Pemerintah Dalam Prekonomian

Untuk menjaga pembangunan ekonomi maka pemerintah harus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, menjaga pertumbuhan penduduk sesuai kendali, meningkatkan usaha-usaha kreatif menengah UKM, melakukan transmigrasi agar pendapatan per kapita semakin terdistribusi baik.

4. Strategi Menjalankan Tugas Peran Pemerintah

Strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya (Tjiptono, 1997, p. 3). Menurut Pakar strategi, Hamel dan Prahalad mendefinisikan strategi yang terjemahannya sebagai berikut: “Strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Sedangkan menurut Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafi’i, strategi adalah rencana-rencana atau langkah-langkah yang akan ditempuh dalam upaya memecahkan suatu masalah yang tengah di hadapi. Kata strategi tentu bukan (statement) yang bersifat menggeneralisir bisa digunakan oleh siapa saja dalam menghadapi persoalan yang ada. Strategi pemberdayaan adalah suatu cara dalam mengoptimalkan upaya-upaya pemberdayaan yaitu dengan cara mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat

dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan.¹⁸

Dalam bukunya Suwarsono Muhammad (2012:63-71) menegaskan bahwa ada lima tokoh besar dalam strategi pemerintahan yaitu : John M. Bryson, Paul C. Nutt, Robert W. Backoff, Geoff Mulgan dan Mark H. Moore. Dimana lima tokoh tersebut memberikan pandangannya masing-masing terhadap strategi pemerintahan. Terdapat 4 model Strategi pemerintahan yang diuraikan oleh para ahli diatas, antara lain:

- a. Strategi Pemerintahan Model Bryson : Konservatif
- b. Strategi Pemerintahan Model Nutt dan Backoff : Klasik
- c. Strategi Pemerintahan Model Mulgan : Progresif
- d. Strategi Pemerintahan Model Moore : Proporsional

Karya Geoff Mulgan merupakan representasi yang pas atas paham yang menyatakan bahwa strategi publik berbeda secara signifikansi dengan strategi perusahaan. Mulgan memberikan beberapa contoh diantaranya, penjara dan rumah sakit sama-sama membutuhkan pengelolaan berkualitas tetapi strategi untuk mengatasinya berbeda. Rincian strategi untuk menciptakan pekerjaan berbeda dengan strategi untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Contoh lain, strategi yang diimpor perusahaan juga tidak bisa membantu memenangkan pertempuran militer, sekaligus bisa membantu dalam logistik dan pencarian personalia.

Organisasi publik memiliki konteks unik yang berbeda dengan

¹⁸ Fahmi, "Economic Empowerment of the Muslim Community (Study on The Assembly of Ta'lim Almuthmainah in Ponorogo District)."

perusahaan. Dari sisi kendala misalnya, organisasi publik perlu lebih memperhatikan opini publik. Organisasi publik juga mengenal betul apa yang disebut dengan faksi politik. Dari sisi penerimaan ada batasan kemampuan pembayaran pajak. Dari sisi peluang, organisasi publik dalam batas-batas tertentu bisa dikatakan memiliki alat yang lebih variatif dan kadang-kadang memiliki kemampuan memaksa, misalnya melalui regulasi. Karena pandangannya yang tegas ini mengategorikan karya Mulgan sebagai Progresif. Singkatnya model Mulgan disebut sebagai progresif karena berjalan menghindari terlalu jauh dari manajemen bisnis dan memberikan porsi yang amat besar pada elemen ilmu politik.

a. Integrasi ke depan

Integrasi ke depan berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau peritel. Semakin banyak pemasok yang menjalankan strategi integrasi ke depan contohnya dengan cara membangun situs web secara langsung menjual produk mereka kepada konsumen. Cara yang efektif untuk menerapkan integrasi ke depan adalah pewartalabaan (franchising). Bisnis memanfaatkan pewartalabaan untuk mendistribusikan produk atau jasa mereka. Bisnis dapat melakukan ekspansi secara cepat melalui pewartalabaan karena biaya dan peluang yang muncul disebar dikalangan banyak individu.

b. Penetrasi pasar

Penetrasi pasar adalah strategi yang mengusahakan peningkatan

pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran produk-produk promosi penjualan secara ekstensif atau pelipatgandaan upaya-upaya pemasaran.

c. Pengembangan produk

Pengembangan produk adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan pengembangan.

d. Diversifikasi

Diversifikasi terkait ketika rantai nilai bisnis memiliki kesesuaian strategis lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif.¹⁹

B. Acuan Program Pembangunan Lapak UMKM

Keberadaan lapak UMKM kian dioptimalkan. Hal itu terlihat dari keseriusan pemkot setempat dalam menggodok rencana pembangunan lapak-lapak yang ada di kelurahan. Seperti yang terlihat pada Senin (14/2). Wali Kota Madii memimpin rakor pemaparan rencana pembangunan lapak yang ada di Kelurahan Taman. Total Pemkot Madiun mengalokasikan Rp 2,29 miliar untuk penyempurnaan seluruh lapak yang ada di Kecamatan Taman pada tahun ini. Sedangkan besaran anggaran di tiap-tiap kelurahan berbeda

¹⁹ Iffa Tri Cahyani, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Gerai Pusat Produk Ukm/Ikm Pratistha Harsa Kabupaten Banyumas Skripsi," (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021).

sesuai usulan masing-masing. Hal itu, menyesuaikan dengan penyempurnaan yang diinginkan. “Langsung jalankan pembangunan. Lapak ini kita sempurnakan agar semakin menarik. Juga ditambah dengan fasilitas yang memadai. Sehingga, bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat,” tegas Wali Kota Madi.

“Anggaran sudah ada, rencana penyempurnaan juga sudah siap. Segera saja untuk dilaksanakan. Semakin cepat semakin segera selesai, masyarakat segera bisa menikmati,” jelasnya. Setiap lurah diminta memaparkan rencana pembangunan satu persatu. Berbagai rencana penyempurnaan pun mengemuka. Mulai penambahan air mancur, penambahan payung dan tempat duduk, penambahan lampu, penambahan mainan, dan lain sebagainya. Wali kota sengaja mengecek satu-persatu agar pembangunan maksimal. Wali kota tidak ingin penyempurnaan asal-asalan.

C. Indikator Kesejahteraan

Mamba et al. (2021) menyatakan bahwa indikator kinerja kesejahteraan keuangan UKM adalah penjualan per tahun, laba pertahun, asset bersih, dan jumlah pekerja.



BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Lapak

Dongkrak Perekonomian, Pemkot Madiun Bangun 27 Lapak UMKM untuk mendongkrak perekonomian rakyat di masa pandemi, Pemerintah Kota Madiun tak hanya mempercantik sarana sektor pariwisata di pusat Kota seperti Jalan Pahlawan atau Pahlawan Street Centre saja. Dibawah kepemimpinan duet WaliKota Madiun, Bapak Maldi dan Wakil WaliKota, Bapak Inda Raya, Pemkot Madiun membangun 27 Lapak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang tersebar di 27 kelurahan. Pembangunan 27 Lapak UMKM difokuskan untuk menumbuhkan ekonomi berbasis lokal di masing-masing kelurahan.

Menurut WaliKota, pembangunan Lapak UMKM di seluruh kelurahan sebagai wujud pemerataan pembangunan di Kota Madiun dan menunjang program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat. Bagi WaliKota, pembangunan Lapak UMKM akan memberikan kesempatan bagi pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, Lapak-Lapak dibangun di tempat strategis sehingga memudahkan warga mengakses lokasinya. Wali Kota Madiun berharap setiap kelurahan memiliki ikon tersendiri sekaligus sebagai perputaran ekonomi. Selain warga setempat, Pemkot Madiun bakal mendatangkan wisatawan melalui jalur sepeda wisata setelah masa pandemi selesai.

Selain itu, Maldi menyatakan ke depan konsumsi semua acara

maupun kegiatan pemerintah dari UMKM-UMKM tersebut. Untuk pemerataan, digunakan sistem bergiliran kelurahan ke kelurahan agar ekonomi tingkat kelurahan terus berjalan. “Dengan pola seperti itu maka masing-masing kelurahan bisa menjadi kelurahan mandiri,” katanya. WaliKota menyebutkan sebanyak 27 kelurahan di Kota Madiun memiliki Lapak masing-masing.

Maidi meminta agar pelaku usaha kecil meningkatkan kualitas produk yang dijual. Untuk itu, aparat pemerintah di tingkat kelurahan harus lebih banyak turun melakukan pembinaan agar produk-produk unggulan tiap daerahnya tetap terjaga. Lebih dari 700 UMKM diberdayakan untuk mengisi Lapak kelurahan. Mulai dari bisnis kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan. Untuk membangun 27 Lapak di tiga kecamatan di bumi Kota Pendekar, Pemkot Madiun menggelontorkan anggaran Rp 15 miliar. Masing-masing kecamatan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 5 miliar untuk program ini

WaliKota menuturkan anggaran untuk pembangunan Lapak UMKM sudah digelontorkan sejak tahun 2020 sebesar Rp 8 miliar. Tahun 2021, Pemkot Madiun menambahkan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Masyarakat pun menyambut positif pengembangan Lapak UMKM. Hal ini terlihat dari warga yang ingin berjualan di Lapak UMKM bertambah banyak. Dia juga meminta perusahaan di masing-masing kelurahan mengucurkan dana CSRnya untuk mengembangkan Lapak UKM. Selain itu mantan Sekda Kota Madiun ini berpesan agar pembangunan Lapak

UMKM tidak boleh merusak areal persawahan yang ada. “Di tengah sawah bisa ada ikon-ikon untuk ekonomi tambahan. Dengan demikian, petani tetap berjalan dan ekonomi terus tumbuh,” kata WaliKota. Berbekal pembangunan sektor pariwisata di pusat Kota dan seluruh kelurahan, WaliKota optimistis saat pandemi Covid-19 usai, Kota Madiun akan menjadi destinasi terbaik di Jawa Timur bagian barat.

B. Pelaksanaan Program Pembangunan Lapak UMKM

Pelaksanaan Program Pembangunan dalam menjamin kesejahteraan Kota Madiun untuk menjamin keberlangsungan UMKM di tinjau dari beberapa aspek yaitu:

1) Peran

Untuk mengetahui apakah pemerintah mengecek langsung atau tidak pada saat pembangunan maka peneliti melakukan wawancara dengan responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun ini:

Berikut hasil wawancara dengan ibu Umi selaku UMKM di lapak kelurahan taman.

“ada dari LPMK kelurahan sama kadang bu lurah juga ke sini cek langsung sampai mana progresnya”²⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Isna Maysya selaku UMKM di Lapak nambangan kidul

“iya ada mbk bapak WaliKota sendiri yang kesini melihat udah sampai tahap apa, terus kemarin juga sempat molor dalam pembangunannya itu bapak WaliKota langsung

²⁰ Umi, Wawancara, 9 April 2023.

datang dan mengawasi langsung agar pembangunan cepat selesai mbk. Ya biasalah mbk orang nek tukang gitu kadang kerjane ada yang cepet ada yang leha-leha males-malesan gitu mbk. Terus pas di awasin langsung dengan bapak WaliKotanya itu pembangunannya jadi cepat selesai juga terus peresmianya juga akhirnya tetap pada tanggal yang sudah di perkirakan WaliKota. Ya gitu mbk kalo nga di awasin langsung ya suka males-malesan”²¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di Lapak kelurahan kejuron.

“iya kalau atasan ngecek-ngecek gitu sering mbk tapi kalo di Lapak ini setau saya pak WaliKotanya datangnya hanya saat peresmian saja mbk”²²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di kelurahan nambangan lor.

“iya pak WaliKota sendiri kadang juga dari dinas, terus orang PU ngecek kesini terus kalo yang setiap hari kesini dulu itu yang pemborongnya mbk”²³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, dapat di simpulkan bahwa Wali Kota Madiun turun tangan langsung dalam pengawasan pembangunan Lapak UMKM di setiap kelurahan dan memastikan bahwa pembangunan selesai pada waktu yang telah di tentukan dan jika pembangunan molor pemerintah langsung menuju tempat pembangunan dan menunggu langsung di sana agar para pekerja bekerja dengan cepat.

²¹ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023.

²² Citra, Wawancara, 11 April 2023.

²³ Sri Handono, 11 April 2023.

2) Layanan atau sosialisasi

Untuk mengetahui pemerintah memberikan/ menyediakan pelatihan/ sosialisasi atau tidak peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun ini:

Berikut hasil wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman.

“kalo sosialisasi ada, kita dibuatkan grup wa untuk sosialisasi pedagangUMKM, menawarkan produk itu juga ada terus di kelurahan itu juga ada , dulu saat awal pembangunan didini juga sering ada pertemuan di kelurahan sebulan sekali itu secara rutin”²⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan Isna Mayasya selaku UMKM di Lapak kelurahan nambangan kidul.

“iya ada mbk biasanya itu di Surabaya kalo mau nambah menu baru di ajari di sana tapia da juga yang di Madiun tergantung kedapetan jatah dimana mbk”²⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kelurahan kejuron

“enggak mbk malah biasanya kalo sini ada acara gitu ngundang WaliKota mbk, kalo sosialisasi jarang. Tapi nga tau mbk kalo ibunya yang di undang soalnya kan saya di sini bukan yang punya usaha mbk saya cuma karyawan disini”²⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di Lapak kelurahan nambangan lor.

²⁴ Umi, Wawancara, 9 April 2023

²⁵ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023.

²⁶ Citra, Wawancara, 11 April 2023.

“iya pernah ada mbk, tata cara kayak aturan cara berdagang di Lapak itu seperti apa gitu”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, dapat di simpulkan bahwa Wali kota bertanggung jawab secara keseluruhan bukan hanya dalam masalah pembangunan saja tetapi juga memikirkan tentang apakah para pelaku UMKM sudah cukup mampu untuk mengelola lapak dengan penjualannya, maka dari itu pemerintah pun menyediakan pelatihan sebagai bentuk pembelajaran untuk para pelaku UMKM di Lapak agar mampu berjualan dengan benar.

1) Ide pemerintah

Untuk mengetahui ide dari pemerintah ini untuk membangun Lapak UMKM ini membuat para UMKM senang maka peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun ini:

Berikut hasil wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman

“iya tentu senang mbk punya tempat gratis terus bisa menetap disini”²⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Isna Maysya selaku UMKM di kelurahan nambangan kidul”

“senang lah mbk kalo di luaran sana haru bayar kalo mau meyewa tempat untuk jualan kalo disini kan enggak mbk

²⁷ Sri Handono, 11 April 2023.

²⁸ Umi, Wawancara, 9 April 2023

sudah jadi tinggal nrmpatin saja”²⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kelurahan kejuron

“seneng mbk jadi nga usah repot-repot menggotong barang dagangan lagi kaya dulu saya”³⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di kelurahan nambangan lor.

“alhamdulillah senang mbk soalnya kan disini bersih juga ga ada uang sew akita Cuma bayar yang listrik sama uang air sama uang buat bersih-bersih aja mbk alhamdulillah”³¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa ide dari pemerintah tersebut sangat membantu masyarakat khususnya para pelaku UMKM karena bisa mendapatkan tempat yang nyaman dan bersih untuk berjualan dan tidak di pungut biaya sewa perbulannya.

2) Iuran

Untuk mengetahui apakah ada iuran atau tidak peneliti melakukan mewawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun

Berikut adalah wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman.

“ada iurannya mbk kalo kita sehari 3k untuk bayar listrik

²⁹ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023.

³⁰ Citra, Wawancara, 11 April 2023.

³¹ Sri Handono, 11 April 2023.

sama air, udah itu aja sih mbk ga ada bayar apa-apa”³²

Berikut wawancara dengan Isna Maysya selaku UMKM di lapak nambangan kidul

“kalau iuran per bulan buat Lapak ndak ada mbk tapi ada mbyar 150k per Lapak untuk menggaji cleaning serving mbk soalnya kan ini besa ya mbk icon sini juga bisa dibilang jadi bayar cleaning servis buat bersih-bersih, tapi alhamdulillah nga keberatan mbk soalnya ya pemasukannya setiap hari ya alhamdulillah cukup, lebih lah mbk kalo dibilang mah”³³

Selanjutnya hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kejuron.

“per hari mbk, per hari itu 10k itu belum uang listrik sama air itu 40k, tapi kalo Lapak sendiri itu ada uang kas nya biasanya 10k per bulan itu nanti kalo ada acara apa-apa terus butuh beli apa-apa nanti pakek uang kas mbk”³⁴

Selanjutnya wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di kelurahan nambangan lor.

“ada iuran tapi ya iurannya untuk Lapak sendiri mbk, kayak untuk bersih-bersih, listrik terus yang bersih-bersih di kelurahan juga di tugasin bersih-bersih disini kalo pagi sama siang kalau malemnya ada sendiri yang bagian penjaga malam disini soalnya kan ada cctv di sini tap ikan belum aktif ya mbk jadi khawatirnya kalo ada anak-anak nakal kayak gitu. Ya kalau Lapaknya ramai 10k tapi kalau sepi ya di adakan presentase kalau penjualan sedikit ya 5k tapi kalo ngak jualan ya 3k.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas

³² Umi, Wawancara, 9 April 2023

³³ Isna Maysya, Wawancara 11 April 2023.

³⁴ Citra, Wawancara, 11 April 2023.

³⁵ Sri Handono, Wawancara, 11 April 2023.

dapat disimpulkan bahwa pemerintah juga memikirkan pengeluaran untuk membayar sewa tempat jualan bagaimana, maka dari itu pemerintah tidak memungut biaya perbulannya para UMKM cukup senang dengan adanya kebijakan tersebut para pelaku UMKM hanya membayar listrik serta untuk perawatan kebersihan setiap harinya yang di kerjakan oleh cleaning service dan berdasarkan wawancara di atas para pelaku UMKM tidak merasa keberatan dengan itu.

C. Strategi Pemerintah Kota Madiun dalam pembangunan Lapak UMKM

1. Acara pemerintah

Untuk mengetahui acara pemerintah apa saja yang di lakukan di Lapak maka peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun:

Berikut wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman

“kalau sekarang udah agak jarang ya kalau dulu sering paling 3 bulan sekali kan biasanya kan pak Wali sepedah santai terus mampir ke sini kadang juga ada meeting sama klien juga disini atau rapat apa gitu”³⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Isna Maysya selaku UMKM di kelurahan nambangan kidul.

“kadang kayak sosialisasi gitu mbk kayak cara pembayaran

³⁶ Umi, Wawancara, 9 April 2023

pakai qris itu gimana?.”³⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kelurahan kejuron.

“kayak standing gitu mbk kalo acara biasanya”³⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di kelurahan nambangan lor.

“kalo pak Wali yan ronda WaliKota, terus muserbang, terus standing”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah juga mempromosikan Lapak-lapak di setiap kelurahan dengan cara mendatangkan para wisatawan dengan cara bersepeda dan di ajak ke lapak tersebut, pemerintah juga melakukan meeting-meeting nya di lapak dengan tujuan secara tidak langsung mempromosikan kepada rekan-rekan nya untuk mampir ke lapak-lapak yang ada di Kota Madiun ini.

1) Kunjungan pemerintah

Untuk mengetahui seberapa sering pemerintah serta jajarannya berkunjung ke Lapak ini peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun ini:

Berikut hasil wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman.

“banyak mbk, muserbang dulu juga sering buka Bersama

³⁷ Isna Maysya, Wawancara 11 April 2023.

³⁸ Citra, Wawancara, 11 April 2023.

³⁹ Sri Handono, 11 April 2023.

disini Bersama pak Wali dan jajarannya, lalu acara goes pagi pak Wali sering kesini juga terus sering mengadakan dorprize biasanya kayak sembako kalo ndak ya minyak”⁴⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Isna Maysya selaku UMKM di kelurahan nambangan kidul

“kalau sekarang udah agak jarang ya kalau dulu sering paling 3 bulan sekali kan biasanya kan pak Wali sepedah santai terus mampir ke sini kadang juga ada meeting sama klien juga disini atau rapat apa gitu”⁴¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kelurahan kejuron.

“hampir 3 bulan sekali mbk”⁴²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di kelurahan nambangan lor

“ya ngak mesti dulu satu bulan sekali kesini terus kalau sekarang 3 bulan sekali, tapikan sekarang ada “pancasoka” juga Lapak pancasoka itu di sosropuran itu jadi acaranya di bagi ngak disini terus”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak lupa setelah pembangunan selesai pun pemerintah juga sering berkunjung ke lapak-lapak yang ada bertujuan untuk mengecek apakah penjualan berjalan dengan lancar dan apakah para pelaku UMKM semangat dalam berjualan nya.

⁴⁰ Umi, Wawancara, 9 April 2023

⁴¹ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023.

⁴² Citra, Wawancara, 11 April 2023.

⁴³ Sri Handono, 11 April 2023.

2) Bergabung

Untuk mengetahui berapa lama para UMKM bergabung disini peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun ini:

Berikut hasil wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman.

“kurang lebih 2 tahun mbk sejak adanya Lapak ini samapi sekarang alhamdulillah”⁴⁴

Berikut hasil wawancara dengan Isna Meysya selaku UMKM di nambangan kidul.

“saya disini baru satu tahun ini pada saat ini di bangun saya sudah di sini”⁴⁵

Berikut hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kejuron

“saya disini hamper 7 bulanan mbk karena sebelumnya buakn saya yang disini”⁴⁶

Berikut hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di lapak nambangan lor.

“mulai pembukaan itu saya langsung disini mbk sekitar 2 tahun lalu”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa para masyarakat khususnya para pelaku UMKM sangat excited untuk menempati tempat baru untuk

⁴⁴ Umi, Wawancara, 9 April 2023

⁴⁵ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023.

⁴⁶ Citra, Wawancara, 11 April 2023.

⁴⁷ Sri Handono, 11 April 2023.

mereka berjualan, di buktikan dengan para pelaku UMKM langsung mengajukan diri saat pendaftaran menjadi UMKM di lapak ini dan mengikuti langkah demi langkah persyaratannya..

3) Awal mula

Untuk mengetahui bagaimana cara bergabung di Lapak UMKM ini peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun ini:

Berikut hasil wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman

“itu ada forum per Kotak itu dapat undangan dari kelurahan yang mau ngisi Lapak Monggo dipersilahkan sama perKota kita juga kurasi Mbak di situ masuknya di sini jadi bahan makanannya kurasi dulu produknya layak boleh jualan kalau yang awal kurasi baru pendirian ini dekorasi dulu semua produknya”⁴⁸

Berikut hasil wawancara dengan Isna Meysya selaku UMKM di lapak kelurahan nambangan kidul

“Kan dulu jualannya di situ Mbak tempat para penjual dagang biasanya, terus ini direhab pindah di relokasi depan toko bangunan itu”⁴⁹

Berikut hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kelurahan kejuron.

“Dulu ikut bosnya yang cewek kan di alun-alun terus keluar terus saya dipanggil lagi sama ibunya jualan di sini bukan

⁴⁸ Umi, Wawancara, 9 April 2023

⁴⁹ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023

punya saya Mbak usahanya ini”⁵⁰

Berikut hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di kelurahan nambangan lor.

“Kemarin itu ditawarin Mbak tapi yang diutamakan ibu-ibu yang sudah berjualan dulu terus pindah ke sini lalu setelah itu ibu-ibu yang nganggur gitu mbak ditawari yang belum punya penghasilan itu kalau mau jualan di sini boleh dan akhirnya saya jualan di sini Mbak sebelumnya saya belum mempunyai usaha apapun saya ibu rumah tangga”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa para masyarakat khususnya para pelaku UMKM sangat excited untuk menempati tempat baru untuk mereka berjualan, di buktikan dengan para pelaku UMKM langsung mengajukan diri saat pendaftaran menjadi UMKM di lapak ini dan mengikuti langkah demi langkah persyaratannya.

4) Yang dijual

Untuk mengetahui apa saja yang dijual di Lapak ini peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun ini:

Berikut hasil wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan kejuron.

“Saya di sini menjual ada mendoan tahu bakso jadah bakar tahu isi sama mie instan Mbak sama minuman-minuman gitu”⁵²

⁵⁰ Citra, Wawancara, 11 April 2023.

⁵¹ Sri Handono, Wawancara, 11 April 2023.

⁵² Umi, Wawancara, 9 April 2023

Berikut hasil wawancara dengan Isna Meysya selaku UMKM di kelurahan nambangan kidul.

“Kalau saya menjual makanan Mbak kayak soto daging soto babat rawon kayak gitu mbak”⁵³

Berikut hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kejuron

“Kalau Lapak saya itu menjual crepes sama jasuke Mbak”⁵⁴

Berikut hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di lapak nambangan lor.

“Ya soft drink es krim kopi teh kalau Lapak saya khusus soft drink tapi juga ada Indomie gitu”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah membebaskan para pelaku UMKM untuk menjual apa saja yang di inginkan nya di buktikan dengan banyaknya ragam barang seperti baju, celana, hijab dan lain lain serta makanan yang di jual di lapak-lapak seperti makanan yang di jual pada umumnya.

5) Acara masyarakat

Untuk mengetahui apa saja acara masyarakat sekitar yang diadakan di Lapak UMKM ini peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun ini:

⁵³ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023

⁵⁴ Citra, Wawancara, 11 April 2023.

⁵⁵ Sri Handono, Wawancara, 11 April 2023.

Berikut wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman.

“Ulang tahun pernah arisan keluarga arisan RT RW terus bulan Desember kemarin kita mengadakan pengajian bersama oleh masyarakat sekitar”⁵⁶

Berikut hasil wawancara dengan Isna Meysya selaku UMKM di kelurahan nambangan kidul.

“Ya ulang tahun reuni terus arisan gitu-gitu lah Mbak”⁵⁷

Berikut hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kelurahan kejuron.

“Oh nggak tahu Mbak soale kadang bukan shiftku shift-ku sore jadi nggak tahu acara pagi itu ada apa aja”⁵⁸

Berikut hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di kelurahan nambangan lor.

“Ulang tahun arisan reuni rapat terus sponsor-sponsor gitu kayak yahunda susu gitu-gitu”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah juga menghimbau untuk para masyarakat mendukung UMKM di lingkungannya untuk tetap jalan dengan cara membuat acara untuk mengikut sertakan UMKM di lapak untuk campur tangan untuk membantu acara-acara masyarakat dengan mudah contohnya seperti arisan keluarga,

⁵⁶ Umi, Wawancara, 9 April 2023

⁵⁷ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023

⁵⁸ Citra, Wawancara, 11 April 2023.

⁵⁹ Sri Handono, Wawancara, 11 April 2023

arisan RT RW, ulang tahun para masyarakat serta reuni-reuni yang diadakan di lapak UMKM tersebut.

6) Perbedaan

Untuk mengetahui apa perbedaan berjualan di Lapak UMKM ini dengan berjualan di tempat sebelumnya maka peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun ini:

Berikut hasil wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman.

“Kalau dulu sebelumnya kan di car free day karena car free day-nya pindah di bantaran setiap minggu jadi kita dapat tempat di sini tiap hari jadi banyak omset itu banyak harian ada kalau dulu omsetnya hanya seminggu sekali sekalian sekarang harian ada terus omsetnya Alhamdulillah”⁶⁰

Berikut hasil wawancara dengan Isna Meysya selaku UMKM di kelurahan nambangan kidul.

“Bedanya sekarang lebih ramai saja kan sekarang tempatnya bersih nyaman gitu kalau dulu kan masih kumuh gitu mbak”⁶¹

Berikut hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kelurahan kejuron.

“Kalau di sini kan menetap kalau dulu kayak pleseran gitu mbak omset juga di sini lebih meningkat daripada sebelumnya enak kalau di sini nggak usah pindah-pindah

⁶⁰ Umi, Wawancara, 9 April 2023

⁶¹ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023

barang”⁶²

Berikut hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di kelurahan nambangan lor

“Kalau saya sebelum ini ibu rumah tangga Mbak jadi saya tidak berjualan atau tidak berpenghasilan”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM lebih sejahtera dengan adanya Lapak ini, di buktikan dengan hasil wawancara bahwa para UMKM yang ada di Lapak mengaku bahwa tempat sekarang lebih efektif dan efisien untuk berjualan dan dibuktikan dengan hasil yang di dapat sesudah menempati Lapak UMKM ini lebih banyak dari sebelumnya

7) Ekonomi

Untuk mengetahui apakah pemerintah berhasil memajukan prekonomian para pelaku UMKM dengn adanya Lapak peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM yang ada di Lapak Kota Madiun ini:

Berikut hasil wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman.

“Ya tentu ada Mbak kalau penjualan sekarang itu lebih banyak daripada sebelumnya soalnya sekarang kan jualannya setiap hari kalau dulu kan cuma di car free day”⁶⁴

⁶² Citra, Wawancara, 11 April 2023.

⁶³ Sri Handono, Wawancara, 11 April 2023

⁶⁴ Umi, Wawancara, 9 April 2023

Berikutnya hasil wawancara dengan Isna Meysya selaku UMKM di kelurahan nambangan kidul.

“Iya ada Mbak perubahan ekonomi lebih meningkat dari sebelumnya”⁶⁵

Berikut hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kelurahan kejuron.

“Ya itu Mbak omsetnya lumayan tembus tapi kalau puasa ini lumayan menurun ramainya cuma waktu malam saja”⁶⁶

Berikut hasil wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di kelurahan nambangan lor.

“Ya mengubah mbak soalnya kalau sekarang kan jualan kalau dulu tidak kalau sekarang kan dapat income Mbak”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa ada perubahan atau peningkatan ekonomi pada setiap UMKM yang bergabung di Lapak tersebut dan lebih ramai pembeli saat penjualan berlangsung

D. Dampak program pembangunan lapak terhadap jaminan kesejahteraan UMKM?

1. Untuk mengetahui apa saja dampak penyediaan Lapak untuk para UMKM dan masyarakat sekitar peneliti melakukan wawancara kepada responden selaku UMKM di Lapak Kota Madiun ini:

Berikut hasil wawancara dengan Umi selaku UMKM di kelurahan taman.

⁶⁵ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023

⁶⁶ Citra, Wawancara, 11 April 2023.

⁶⁷ Sri Handono, 11 April 2023

“Kalau saya sendiri ya itu Mbak meningkatkan ekonomi keluarga saya juga mungkin kalau bagi masyarakat sekitar lebih gampang saja membeli makanannya lebih dekat”⁶⁸

Berikut hasil wawancara dengan Isna Meysya selaku UMKM di kelurahan nambangan kidul.

“Iya senang Mbak tambah ramai pedagangnya juga tambah banyak bersih juga setiap hari juga ada live musik Mbak jadi tidak sepi sampai malam biasanya live musiknya”⁶⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Citra selaku UMKM di kelurahan kejuron.

“Lumayan Mbak sekarang di sini tambah ramai selalu ada pembeli”⁷⁰

Selanjutnya wawancara dengan Sri Handono selaku UMKM di kelurahan nambangan lor.

“Ya sekarang enakya lebih tertata penjualannya terus masyarakat sekitar juga kalau mau beli lebih dekat enak juga tidak membayar hanya iuran itu saja”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari penyediaan Lapak ini berhasil membuat para UMKM lebih sejahtera karena para pelaku UMKM di permudah berjualan nya, tida takut kehujanan dan tidak perlu takut di gusur sebab pemerintah secara resmi memfasilitasi para pelaku UMKM untuk tempat berjualan dengan aman dan

⁶⁸ Umi, Wawancara, 9 April 2023

⁶⁹ Isna Maysya, Wawancara, 11 April 2023

⁷⁰ Citra, Wawancara, 11 April 2023.

⁷¹ Sri Handono, Wawancara, 11 April 2023

nyaman



BAB IV
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN
KEBERLANGSUNGAN UMKM

A. Pelaksanaan program pembangunan Lapak UMKM

1. Pengawasan Langsung Oleh Pemerintah Dalam Pembangunan

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk. pengawasan merupakan unsur penting dalam suksesnya pelaksanaan pembangunan. Lebih jauh, pengawasan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria seperti pengawasan harus mendukung aktivitas kegiatan, pengawasan harus melaporkan segala bentuk penyimpangan, pengawasan harus memiliki pemikiran ke depan, pengawasan harus faktual, akurat serta sesuai dengan standar yang digunakan, pengawasan harus fleksibel, pengawasan harus sesuai dengan paradigma organisasi, pengawasan harus mudah dipahami, pengawasan harus dikoreksi dan diadakan pembetulan

Pembangunan Lapak di Kota Madiun merupakan salah satu program yang ditetapkan Pemerintah Kota Madiun untuk APBD. Lapak menjadi wajah baru bagi Kota Madiun untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui sebuah gagasan pusat ekonomi dengan para UMKM serta menyiapkan fasilitas penunjang yang tepat demi mendorong kegiatan kreatif masyarakat Madiun (Hamrun et al., 2020) Dengan gagasan mengenai Lapak Kota Madiun dan perekonomian masyarakat Kota Madiun.

Pembangunan Lapak Kota Madiun sebagai ekonomi kreatif masyarakat Kota Madiun merupakan jawaban bagi banyaknya kebutuhan pelaku UMKM di Kota Madiun yang membutuhkan tempat untuk memasarkan produk. Kegiatan perekonomian di Kota Madiun sendiri banyak didorong oleh berkembangnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang terus bertambah.

Berkaitan dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menjadikan Pemerintah Kota Madiun dituntut untuk menciptakan program yang dapat mendukung keberlangsungan UMKM di mendongkrak perekonomian Kota Madiun⁷²

2. Memberikan pelatihan kepada UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penopang ekonomi yang paling besar dalam perekonomian di Indonesia dibuktikan dengan adanya UMKM yang menjadi katup pengaman perekonomian Indonesia pada masa krisis dan menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi pasca krisis (Tedjasuksmana, 2014). UMKM menjadi sektor usaha terbesar kontribusinya terhadap pembangunan Negara serta mampu membuka lapangan kerja yang cukup luas bagi para tenaga kerja, sehingga mampu meminimalisir angka pengangguran di Indonesia (Wijanarko & Susila, 2016).⁷³

⁷² Nungky Wanodyatama Islami and Akbar Pandu Dwinugraha, *PERAN SERTA PEMUDA DALAM PENGELOLAAN BUMDESA UNTUK MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MALANG*, 2021.

⁷³ Helmi Prasetyo Yuwinanto, "Pelatihan Keterampilan Dan Upaya Pengembangan UMKM Di

Beberapa kelemahan mendasar UMKM pada aspek pemasaran yakni rendahnya penyesuaian pasar, kurang kuat dalam persaingan yang kompleks, dan infrastruktur pemasaran yang kurang memadai (Suci, 2017). Penguasaan terhadap pasar merupakan prasyarat guna menumbuhkan daya saing UMKM dalam menghadapi mekanisme pasar yang semakin kompetitif dan kompleks (Sedyastuti, 2018). Maka dari itu, peran dari pemerintah guna mendorong pertumbuhan UMKM dalam memperluas akses pasar melalui pelatihan.⁷⁴

3. Adanya pembangunan oleh pemerintah

Dengan adanya fasilitas Lapak di setiap kelurahan pemerintah Kota Madiun tidak memungut biaya atau uang sewa perbulan tetapi uang listrik dan uang air di bebaskan pada setiap UMKM yang menempati Lapak tersebut, seperti penjelasan dari beberapa responden yang ada.

Wali Kota Madiun Maldi mengatakan, pihaknya tengah mengusahakan pembangunan Lapak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di seluruh kelurahan di Madiun sebagai wujud pemerataan pembangunan. Pembangunan itu, sebut dia, turut menunjang program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terfokus di tengah Kota saja. “Pemerintah pusat menginstruksikan peningkatan ekonomi berbasis

Jawa Timur Skill and Effort Training UMKM Development in East Java,”.

⁷⁴ Nurriha Ayu and Asep Nurjaman, “Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (June 2022): 59–69.

lokal saat ini harus dikedepankan. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mewujudkannya dengan membangun Lapak UMKM di tiap kelurahan,” kata Maudi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (26/5/2021).

Menurutnya, pembangunan Lapak UMKM akan memberikan kesempatan bagi pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya. Tak hanya itu, pembangunan Lapak-Lapak di tempat strategis akan memudahkan warga untuk mengakses lokasinya. "Hal itu dilakukan agar setiap kelurahan memiliki ikon tersendiri, sekaligus menjadi ladang perputaran ekonomi,"

4. Fungsi iuran itu sendiri bagi Lapak

Dimana, fungsi uang iuran itu sendiri untuk kebutuhan Lapak juga. Seperti membeli kebutuhan bahan untuk acara di Lapak. Dan advokasi anggota jika ada yang bermasalah dalam perusahaan. Lalu untuk membayar listrik, air serta cleaning servis.

B. Strategi pemerintah kota madiun dalam pembangunan Lapak terhadap jaminan kesejahteraan UMKM

1. Strategi Pemerintah untuk meramaikan Lapak

Orang nomor satu di Madiun tersebut menjelaskan, pihaknya akan mendatangkan wisatawan melalui jalur sepeda. Ia berharap, ke depannya semua acara maupun kegiatan pemerintah mengambil konsumsi dari sejumlah UMKM yang ada. Untuk pemerataan, digunakan sistem bergiliran tiap kelurahan, agar ekonomi tingkat

kelurahan terus berjalan dan sebagai upaya mempromosikan Lapak.

Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Siagian P. Sondang (2004:20) Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan sadar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (goal) dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.⁷⁵

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.²¹ Sedangkan menurut Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafi'i, strategi adalah rencana-rencana atau langkah-langkah yang akan ditempuh dalam upaya memecahkan suatu masalah yang tengah dihadapi. Kata strategi tentu bukan (statement) yang bersifat menggeneralisir bisa digunakan oleh siapa saja dalam menghadapi persoalan yang ada.⁷⁶

2. Kunjungan yang dilakukan oleh Pemerintah

⁷⁵ Emaya Kurniawati, Wyati Saddewisasi, and Sri Yuni USM Semarang Widowati, "Strategi Peningkatan Omset Penjualan Bagi Pedagang Pasar Bulu Setelah Renovasi," *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis* 14, no. 1 (2020): 40.

⁷⁶ Oktavian and Aminuddin, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Nasabah."

Setelah selesainya pembangunan Lapak ini pemerintah menjadwalkan kunjungan selaku Wali Kota mulai dari setiap bulan sekali samapai paling lama tiga bulan sekali ujar para UMKM di Lapak, berhubung Lapak ada banyak di Kota Madiun ini, tidak mungkin WaliKota sering berkunjung ke satu Lapak saja, apalagi sekarang ada Lapak baru juga yang sedang di bangun dan pekerjaan WaliKota pun tidak hanya untuk Lapak saja masih banyak pekerjaan-pekerjaan WaliKota lainnya yang harus di kerjakan. Tapi setidaknya WaliKota sudah melonggarkan diri untuk berkunjung rutin setiap 3 bulan sekali ke masing-masing Lapak.

3. Lamanya para UMKM menetap di Lapak ini

Kebanyakan para pelaku UMKM di Lapak ini mulai berjualan disini semenjak berdirinya Lapak tersebut ada yang berdiri sudah dari 2 tahun lalu Adapun Lapak yang didirikan pada 1 tahun lalu, pada saat Lapak jadi pun para pelaku UMKM sangat gembira tida sabar berjualan di Lapak ini ujar para responden.

4. Awal mula para UMKM bergabungnya di Lapak

Pada saat pembangunan selesai, setiap kelurahan pun di beri undangan untuk para UMKM siapa saja yang ingin ikut atau yang bersedia bergabung di Lapak UMKM ini. Yang di utamakan adalah para pelaku usaha yang sudah berjualan terlebih dahulu selanjutnya jika masih ada slot itu akan ditawarkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang belum memiliki usaha dan ingin memulai usaha di Lapak

UMKM tersebut.

5. Apa saja yang ada di Lapak

Di Lapak tersebut tersedia berbagai macam makanan, camilan, kerajinan tangan, pakaian serta aksesoris lainnya tapi lebih dominan makanan karena menurut mereka berjualan makanan lebih menguntungkan

6. Apa saja acara masyarakat yang di adakan dalam upaya meramaikan Lapak ini sendiri

Selain acara pemerintah sendiri, pemerintah menghimbau untuk masyarakat mengikut serta kan Lapak pada acara-acara masyarakat untuk mebantu meramaikan Lapak UMKM ini. Usahakan acara apapun itu jika bisa di lakukan di Lapak maka lakukan di Lapak saja ujar para pelaku UMKM di Lapak

7. Perbedaan para UMKM sebelum dan sesudah di Lapak UMKM

Jika dulu para pelaku UMKM harus jauh-jauh untuk berjualan ke tempat jualan sebelumnya seperti di cfd dan tidak dapat berjualan setiap hari artinya tidak mendapatkan penghasilan setiap hari.

C. Dampak program pembangunan Lapak terhadap jaminan kesejahteraan UMKM

Lapak UMKM ini menampung produk-produk UMKM di setiap kelurahan dengan makanan maupun produk khas kelurahan masing-masing dan memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Serta mampu mensejahterakan UMKM di Kota Madiun karena mempunyai

penghasilan yang lebih dari sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program pembangunan Lapak UMKM

Terbukti dengan adanya pengembangan usaha mikro dalam Program Lapak di setiap Kelurahan ini telah berjalan dengan baik terbukti dengan meningkatnya penjualan dan prospek kedepannya serta berkembangnya cara pemasaran atau penjualan yang dilakukan oleh para pedagang meskipun tidak dapat dipungkiri tetap ada kendala-kendala yang harus menjadi perhatian dan fokus untuk perbaikan dan pengembangan lanjutan seperti masalah keamanan, fasilitas tempat makan dan tempat berjualan serta tempat parkir. Dilihat dari aspek teknis dan teknologis.

2. Strategi pemerintah kota Madiun dalam pembangunan lapak UMKM

pemilihan lokasi Lapak bisa dikatakan sudah sesuai dan cukup strategis serta representatif untuk berjualan hanya saja dari segi teknologi bisa di katakan sangat kurang, selama ini para pedagang hanya menggunakan cara sederhana baik untuk alat kerja maupun pengemasan. Sebelumnya pernah diadakan pelatihan pengemasan namun hanya untuk perwakilan pedagang Lapak sehingga hanya sedikit yang sudah terpapar kemampuan pengemasan modern.. Dari cara pengelolaan atau aspek manajemen masih berjalan secara sederhana, namun demikian pengembangan usaha mikro dalam

program Lapak di Kelurahan utamanya dalam system pengelolaan penjualan akan dikembangkan ke arah yang modern secepatnya.

3. Dampak program pembangunan Lapak terhadap jaminan kesejahteraan UMKM

Dampak dari pembangunan Lapak ini adalah mampu memberikan lokasi bagi UMKM untuk berjualan agar lebih tertata rapi dan mampu mengurangi jumlah pengangguran di Kota Madiun dan pendapatan ekonomi di Kota Madiun pun meningkat.

B. Saran

Untuk pemerintah: tetaplah memantau segala pergerakan di setiap Lapak walaupun sudah beberapa tahun berjalan, beri saran kepada para UMKM di Lapak jika dagangannya sepi sebaiknya di beri saran jualan apa saja yang sedang nge trend belakangan ini. Karena saya lihat ada di beberapa Lapak yang ada, beberapa penjual terlihat sepi. Untuk para UMKM: teruslah berinovasi agar penjualan tidak sepi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Nurrizha, and Asep Nurjaman. "Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (June 2022): 59–69.
- Bahri, Arsad, Usman Mulbar, and Andi Suliana. "Study On Makassar City Empowerment Of Msmes As An Efforts To Increase The Welfare Of Business Actors." *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar* 1, no. 1 (2019): 37–53. <https://bppd-makassar.e-journal.id/inovasi-dan-pelayanan-publik/article/view/47>.
- <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Fadila, Nurul. "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2010): 1–18.
- Fahmi, Silvina Choitrotul. "Economic Empowerment of the Muslim Community (Study on The Assembly of Ta'lim Almuthmainah in Ponorogo District)." *Muslim Heritage* 5 (2020): 345–369.
- Gula, Umkm, Kepala Dusun, Rata Benda, Kecamatan Karangmoncol, Universitas Kh, Abdul Wahab, Universitas Kh, Abdul Wahab, Universitas Kh, and Abdul Wahab. "Abstract :". 4, no. 1 (2022): 60–66.
- Hidayatullah, Indra. "Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam." *Dinar* 1, no. 2 (2015): 79–88.
- Iqbal, Muhammad. "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm." *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 77.
- Komariah, Kokom. "Peran Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3703–3711. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.
- Kurniawati, Emaya, Wyati Saddewisasi, and Sri Yuni USM Semarang Widowati. "Strategi Peningkatan Omset Penjualan Bagi Pedagang Pasar Bulu Setelah Renovasi." *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis* 14, no. 1 (2020): 40.
- Maryanto, Maryanto, Munsharif Abdul Chalim, and Lathifah Hanim. "Upaya

- Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha Umkm Yang Terdampak Pandemi Covid-19.” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (2022): 1–11.
- Oktavian, R., and L.H. Aminuddin. “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Nasabah.” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 2 (2022): 333–346.
- Prasetyo, Dimas Arys, and Nasikh. “Penguatan Umkm Melalui Inovasi ‘Lapak Umkm’ Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi.” *E-Qien* 10, no. 2 (2022): 201–206.
<https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/614%0Ahttps://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/download/614/406>.
- Prasetyo Yuwinanto, Helmi. *Pelatihan Keterampilan Dan Upaya Pengembangan UMKM Di Jawa Timur Skill and Effort Training UMKM Development in East Java*, n.d.
- Salam, Monica Dwipi, and Ananta Prathama. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm.” *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 137–143.
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.
- Salmon Priaji Martana. “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia.” *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2006): 59–66.
<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/view/16458>.
- Suhery, Trimardi Putra, and Jasmalinda. “Jurnal Inovasi Penelitian.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 3 (2020): 1–4.
- Wanodyatama Islami, Nungky, and Akbar Panlu Dwinugraha. *PERAN SERTA PEMUDA DALAM PENGELOLAAN BUMDESA UNTUK MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MALANG*, 2021.
- STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN GERAI PUSAT PRODUK UKM/IKM PRATISTHA HARSA KABUPATEN BANYUMAS SKRIPSI*, n.d.